

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA CIMAHI

2.1 Kondisi Umum Kota Cimahi

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Cimahi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di tengah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Cimahi sebelumnya termasuk dalam bagian dari Kabupaten Bandung namun seiring berjalannya waktu, Kota Cimahi ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976 yang kemudian diresmikan sebagai kota yang otonom pada tanggal 21 Juni 2001.

Kota Cimahi terletak diantara 107°30'33" BT – 107°34'30" dan 6°50'00" – 6°56'00" Lintang Selatan. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau, Luas Kota Cimahi seluas 42,432 km². Batas administratif Kota Cimahi tertuang di dalam UU No. 9 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa batas-batas Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cicendo, Kecamatan
Sukajadi, dan Kecamatan Andir, Kota Bandung

Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Bandung
Kulon Kota Bandung

Sebelah Barat : Kecamatan Batujajar, Kecamatan Padalarang, dan
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Kota Cimahi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang memuat 3 (Tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan di dalamnya, yaitu: Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 Kelurahan (Kelurahan Cibereum, Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong, Kelurahan Cibeber), Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 Kelurahan (Kelurahan Baros, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Karangmekar) dan Kecamatan Cimahi Utaea yang terdiri dari 4 Kelurahan (Kelurahan Pasarkaliki, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cipageran).

Kota Cimahi memiliki letak yang berdekatan dengan Kota Bandung yang mengakibatkan banyak masyarakat Kota Cimahi yang bermukim di Kota Cimahi namun memiliki aktifitas seperti pekerjaan, sekolah, dan lain-lain Di Kota Bandung. Karena letak geografisnya, Kota Cimahi minim dalam hal sumber daya alam dan lebih menonjol dalam hal industri yang mana banyaknya adalah industri tekstil.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Cimahi



Sumber: *Profil Kota Cimahi, 2024*

2.1.2 Kondisi Demografis

Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang mempunyai jumlah penduduk banyak, total jumlah penduduk yang menempati Kota Cimahi berhasil menempati Kota Cimahi sebagai kota yang kepadatan penduduknya paling pada nomor 2 setelah Kota Bogor. Namun begitu, pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi terus bertambah seiringnya waktu. Seperti saat ini, banyaknya penduduk Kota Cimahi pada tahun 2024 meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Kota Cimahi pada tahun 2024 tercatat yaitu sebanyak 581,994 jiwa yang terdiri dari 292,434 laki-laki dan 289,560 perempuan. Kota Cimahi sampai saat ini terdiri dari lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Namun jika dilihat berdasarkan kepala keluarga, Kota Cimahi memiliki 191,426 jiwa yang terdiri dari 153,032 kepala keluarga laki-laki dan 38,394 kepala keluarga perempuan. Kota Cimahi memiliki jumlah penduduk berstatus kawin yaitu sebanyak 275,118 jiwa, namun tidak semua dari penduduk yang telah berstatus kawin mempunyai akta perkawinan. Hal ini menandakan bahwa kepala keluarga yang menopang keluarga di Kota Cimahi tidak hanya terdiri dari laki-laki namun ada perempuan yang menjadi kepala keluarga juga. Meskipun begitu, jumlah laki-laki sebagai kepala keluarga di Kota Cimahi masih mendominasi.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Cimahi Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Jenis Kelamin

Wilayah	Penduduk Kota Cimahi		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
Cimahi Selatan	120,570	121,850	242,420
Kelurahan Melong	32,901	32,963	65,864
Kelurahan Cibereum	30,920	31,417	62,337
Kelurahan Utama	17,386	17.775	35,161
Kelurahan Leuwigajah	24,001	24,177	48,178
Kelurahan Cibeber	15,362	15,158	30,880
Cimahi Tengah	82,658	83,313	165,969
Kelurahan Baros	10,334	10,488	20,822
Kelurahan Cigugur Tengah	23,580	24,125	47,685
Kelurahan Karangmekar	8,386	8,313	16,699
Kelurahan Setiamanah	12,121	12,030	24,151
Kelurahan Padasuka	21,313	21,364	42,677

Kelurahan Cimahi	6,942	6,993	13,935
Cimahi Utara	86,334	87,271	173,605
Kelurahan Pasarkaliki	9,581	9,532	19,113
Kelurahan Cibabat	28,135	28,623	56,758
Kelurahan Citeureup	21,666	21,858	43,524
Kelurahan Cipageran	26,952	27,258	54,210
Jumlah keseluruhan penduduk	289,560	292,434	581,994

Sumber: *Profil Kota Cimahi, 2024*

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berstatus Kawin

Wilayah	Penduduk Berstatus Kawin
Cimahi Selatan	116,088
Kelurahan Melong	31,362
Kelurahan Cibereum	29,600
Kelurahan Utama	17,142
Kelurahan Leuwigajah	22,910
Kelurahan Cibeber	15,074
Cimahi Tengah	77,135
Kelurahan Baros	9,493
Kelurahan Cigugur Tengah	22,961
Kelurahan Karangmekar	7,495
Kelurahan Setiamanah	11,030
Kelurahan Padasuka	19,978
Kelurahan Cimahi	6,175
Cimahi Utara	81,895
Kelurahan Pasarkaliki	9,042
Kelurahan Cibabat	26,432
Kelurahan Citeureup	20,421
Kelurahan Cipageran	26,000

Sumber: *Profil Kota Cimahi, 2024*

Tabel 2.3 Jumlah Anak di Kota Cimahi 2024

Umur (L+P)	Jumlah
0-4	37,295
5-9	46,358
10-14	48,305
Jumlah keseluruhan	131,958

Sumber: Profile Kota Cimahi

2.1.3 Kondisi Sosial dan Budaya

2.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting dan dasar yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat untuk menopang pertumbuhan kemajuan bangsa. Adanya pendidikan yang diterapkan pada masyarakat mampu memanbah wawasan masyarakat dan meningkatkan pola pikir masyarakat menjadi lebih dewasa. Di Kota Cimahi dalam bidang pendidikan masih banyak dijumpai beberapa masalah yaitu masih tingginya jumlah penduduk yang masih belum menerima pendidikan yang layak. Tingginya angka tidak/belum sekolah di Kota Cimahi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang rendah, fasilitas sarana dan prasarana yang belum tercukupi bagi masyarakat menyeluruh, dan perekonomian yang masih belum stabil hal ini dibuktikan dengan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat di Kota Cimahi.

Tabel 2.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Cimahi Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

Pendidikan yang ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	40,604	38,201	78,805
Belum Tamat SD/Sederajat	26,924	24,935	51,859
Tamat SD/Sederajat	30,442	37,028	67,470
SLTP/Sederajat	42,906	46,413	89,319
SLTA/Sederajat	95,757	85,701	181,458
Diploma I/II	2,335	3,418	5,753
Akademisi/Diplomasi III/S. Muda	8,911	10,499	19,410
Diploma IV/Strata I	22,283	22,941	45,224
Strata-II	2,794	2,005	4,849
Strata-III	366	186	552

Sumber: Profil Kota Cimahi, 2024

2.1.3.2 Pekerjaan Penduduk

Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki keberagaman dalam mata pencaharian masyarakatnya karena letak kotanya yang strategis baik dari sektor industri atau agraris. Disamping itu, sektor swasta juga banyak mengambil peran dalam menyediakan peluang kerja bagi masyarakat Kota Cimahi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui profil Kota Cimahi hampir separuh 44,77% masyarakat Kota Cimahi yang memiliki usia produktif yaitu 15-64 di tahun 2024 sudah mendapatkan pekerjaan.

Jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Kota Cimahi adalah karyawan swasta yaitu 37,645% yang disusul oleh Buruh Harian Lepas yang mana adalah 31,817% dan pada tiga teratas terakhir adalah wiraswasta yaitu 11,490%.

Namun begitu, angka pengangguran di Kota Cimahi masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan masih perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah Kota Cimahi. Angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh keterampilan masyarakat Kota Cimahi yang masih kurang. Kurangnya keterampilan ini disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan yang selengkap dan masih banyak ditemukan masyarakat yang putus sekolah. Sehingga, masyarakat tidak siap untuk terjun ke ranah pekerjaan langsung.

***Tabel 2.5 Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja yang Belum/Tidak Bekerja
Menurut Pendidikan pada Tahun 2024***

Pendidikan yang ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	4,674	4,040	8,714
Belum Tamat SD/Sederajat	793	599	1392
Tamat SD/Sederajat	1,595	707	2,302
SLTP/Sederajat	2,584	1,049	3,633
SLTA/Sederajat	5,690	2,937	8,627
Diploma I/II	70	66	136
Akademisi/Diplomasi III/S. Muda	235	194	429
Diploma IV/Strata I	555	488	1,043
Strata-II	14	17	31
Strata-III	3	1	4

Sumber: Profil Kota Cimahi, 2024

2.1.3.3 Kondisi dan Permasalahan

Kota Cimahi merupakan kota yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di Provinsi Jawa Barat. Adanya fakta ini merupakan tanda bahwa masalah yang akan dihadapi oleh Kota Cimahi juga tentu akan sangat banyak. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu masalah yang Kota Cimahi hadapi. Adanya keterbatasan membuat kompetisi antara masyarakatnya untuk bertahan hidup. Dengan adanya

masalah ini masih banyak masyarakat Kota Cimahi yang masih belum memperoleh kehidupan yang layak dan kekurangan secara ekonomi.

Namun begitu, angka pernikahan di Kota Cimahi terus mengalami kenaikan. Di dalam suatu keluarga umumnya memang ada kepala keluarga yang sudah seharusnya mencukupi kebutuhan finansial seluruh anggota keluarganya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka kepala keluarga perlu memiliki mata pencaharian yang mampu untuk menopang kebutuhan keluarganya. Namun, masih banyaknya pengangguran mengakibatkan masalah baru di dalam keluarga. Tanpa pemenuhan finansial maka suatu keluarga akan tidak merasakan kesejahteraan dalam rumah tangganya. Adanya ketidaksejahteraan tersebut dapat memicu masalah baru, salah satunya yaitu KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya lahir disebabkan adanya budaya patriarki yang masih melekat dengan masyarakat. Budaya ini menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk yang superior daripada perempuan. Dengan seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang telah meleak terhadap masalah ini. Adanya kesadaran tentang kesetaraan gender mampu didapatkan melalui pendidikan. Namun, di Kota Cimahi masih banyak masyarakat yang belum memperoleh pendidikan layak dan masih tingginya angka putus sekolah. Dengan itu masih banyak yang beranggapan bahwa masalah rumah tangga ini termasuk hal yang tabu untuk dilaporkan dan diungkap ke ranah publik. Angka kekerasan rumah tangga di Kota Cimahi masih mendominasi dalam jumlah kekerasan pada anak dan perempuan.

Lebih lanjut, budaya masyarakat yang masih memandang persoalan rumah tangga sebagai ranah privat turut memengaruhi rendahnya tingkat pelaporan kasus. Norma sosial yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga menyebabkan korban cenderung memilih untuk diam atau menyelesaikan persoalan secara internal. Stigma sosial terhadap korban, terutama perempuan, sering kali memperburuk kondisi psikologis dan menghambat akses terhadap layanan perlindungan. Dalam konteks ini, angka kasus yang tercatat secara administratif belum tentu merepresentasikan keseluruhan realitas yang terjadi di masyarakat. Heterogenitas masyarakat Kota Cimahi juga membawa implikasi terhadap strategi pencegahan yang perlu dilakukan. Keberagaman latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi menuntut pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi mengenai pencegahan KDRT. Program pencegahan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat berpotensi kurang efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku. Dengan demikian, kondisi sosial budaya Kota Cimahi membentuk ekosistem yang memengaruhi munculnya, tersembunyinya, maupun terlaporkannya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap efektivitas P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan KDRT perlu mempertimbangkan konteks sosial budaya tersebut agar penilaian terhadap kinerja kelembagaan tidak bersifat parsial, melainkan komprehensif dan kontekstual.

Dari hasil wawancara dengan Ketua DP3A2PKB Kota Cimahi, banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh budaya yang masih memandang

bahwa KDRT adalah hal yang wajar dan sifatnya adalah guna mendisiplinkan yang biasanya dilakukan oleh kepala keluarga, adanya pola pikir tersebut membuat perempuan dan anak enggan untuk memperkarakannya ke jalur hukum. Selain itu, kemandirian perempuan untuk sektor ekonomi masih belum tercipta dan itu menjadi alasan bagi perempuan dan anak menerima setiap perilaku kekerasan yang diperbuat oleh kepala keluarga kepada mereka. Maka dari itu DP3A2PKB muncul dengan jajaran dibawahnya yaitu P2TP2A Kota Cimahi sebagai unit layanan yang tugasnya adalah melakukan pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak di Kota Cimahi. Adanya pusat pelayanan ini diharapkan untuk membuat masyarakat Kota Cimahi memiliki tempat aman untuk melaporkan tindak kekerasan di Kota Cimahi. Dengan terciptanya P2TP2A sebagai wadah yang menampung laporan dari masyarakat mulai banyak masyarakat yang tidak segan dan berani untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan kepada perempuan dan anak baik yang dialami langsung maupun hanya sekedar menyaksikannya.

2.2 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi

2.2.1 Awal Mula Berdirinya P2TP2A Kota Cimahi

Meskipun perintah dari menteri yang menegaskan setiap kota/kabupaten perlu memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, di Kota Cimahi masih terbelang terlambat untuk membuat pusat pelayanan ini. P2TP2A Kota Cimahi terlahir dari kesadaran akan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak di Kota Cimahi. Menurut wawancara yang telah dilakukan bersama staf P2TP2A

Kota Cimahi, kesadaran akan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak muncul dari Istri Wali Kota Bandung pada periode saat itu. Cimahi yang statusnya masih dekat dengan Bandung akhirnya mulai mengambil langkah yang sama.

Pada saat Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota yang otonom pada 2001, dinas yang menjadi wadah untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah dibentuk yaitu bernama Dinas Sosial P2AKB yang menaungi tentang bagaimana perempuan dan anak mampu mendapatkan kesejahteraan yang sama dan hak-haknya mampu tercukupi. Seiring berjalannya waktu, dinas sosial mulai terbagi-bagi menjadi lebih spesifik lalu munculah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi. Pelayanan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB untuk melindungi perempuan dan anak pada awalnya hanya melalui telfon dari korban tindak kekerasan, yang mana dari pelaporan tersebut daru dilakukan penanganan bagi para korban.

Pada tahun 2018, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Cimahi baru lahir. Namun pada saat itu, kantornya masih berada dengan bagian DP3AP2KB dan baru bisa memiliki ruangannya tersendiri pada 2021. Lahirnya P2TP2A Kota Cimahi membuka gerbang baru bagi perempuan dan anak di Kota Cimahi karena sejak awal sudah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak baik itu untuk melakukan pencegahan atau penanganan.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan P2TP2A Kota Cimahi

2.2.2.1 Fungsi P2TP2A Kota Cimahi

Fungsi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah menjalankan perannya dengan semaksimal mungkin yaitu adalah memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang ada di Kota Cimahi dengan maksimal untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang angkanya semakin naik seiring berjalannya waktu. Selain itu, adanya pusat pelayanan adalah menyediakan pendampingan untuk korban tindak kekerasan bagi perempuan dan anak di Kota Cimahi agar korban mampu untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat.

2.2.2.2 Tujuan P2TP2A

1. Melindungi perempuan dan anak dari segala perbuatan kekerasan, sekalipun kekerasan dalam rumah tangga
2. Mendampingi korban kekerasan bagi perempuan dan anak baik secara psikologis, fisik maupun advokasi hukum
3. Menciptakan sistem layanan terpadu kolaboratif dari masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait
4. Menghapus angka kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Cimahi
5. Merealisasikan pemberdayaan perempuan dan anak untuk mendapatkan hak, perlindungan dan kesempatan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat

2.2.3 Struktur Kepengurusan P2TP2A

Ketua Umum :Wali Kota Cimahi.

Ketua Pelaksana :Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi.

Sekretaris :Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi.

Bendahara :Arie Hendryan A.Md.

BIDANG LAYANAN/TRIAGE/PENGADUAN

Ketua :Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi.

Anggota :

1. Dra. Risdawati (LK3 Kota Cimahi);
2. Yukie Agustia Kusmala, S.Psi, M.Psi;
3. Gantine Mirwati, S.Ikom (LK3 Kota Cimahi);
4. Dea Azhari Novianti, S.Psi;
5. Nadia Saparina, S.Psi, M.B.A.

BIDANG LAYANAN REHABILITASI KESEHATAN

Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Cimahi.

Anggota :

1. Dra. Femmy Yudhaniati, S.Psi (Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi);
2. Dede Fera, S.Psi (Crisis Center Universitas Jenderal Achmad Yani);
3. Ditya Indria Sari, M.Psi (Crisis Center Universitas Jenderal Achmad Yani);
4. Hj. Sunarsah W (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi).

BIDANG LAYANAN REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
pada Dinas Sosial Kota Cimahi.

Anggota:

1. Nina Herlina, SE (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi);
2. Imas Iim, A.Md (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi);
3. Deden Hermawan, SH (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi);
4. Muhammad Rizky, S.Kom., SH (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi);
5. Hj. Eli Heriawati (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi).

BIDANG LAYANAN BANTUAN HUKUM

Ketua : Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kepolisian Resor Cimahi);

Anggota :

1. Aryo Wibisono, SH (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi).
2. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Cimahi;

3. Nana Rusmana, S.H., MH (Pengadilan Bale Bandung);
4. Enang Suparman, S.H., MH (Pengadilan Bale Bandung);
5. Dra. Siti Munawaroh, S.H (Pengadilan Agama Kota Cimahi);

2.2.4 Sumber Pendanaan P2TP2A Kota Cimahi

Keberadaan Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi masih berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dan masih belum menjadi UPTD sendiri sehingga pendanaan masih disalurkan oleh dinas dari APBD dan belum mendapatkan anggaran khusus.

2.2.5 Program Kerja dan Kegiatan

Untuk saat ini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi masih belum mempunyai upaya khusus untuk dilakukan. Namun begitu, P2TP2A Kota Cimahi masih fokus untuk melakukan fungsi dan tujuannya untuk melakukan pencegahan dan penanganan untuk tindak kekerasan bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilaksanakan, program yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi dalam hal melakukan pencegahan adalah melalui edukasi dan sosialisasi. Dalam

melaksanakan edukasi dan sosialisasi, P2TP2A bisa melakukannya dengan inisiatif sendiri atau dari permintaan masyarakat. Biasanya, di sekolah yang memang terindikasi adanya tindak kekerasan pada perempuan banyak melakukan permintaan P2TP2A Kota Cimahi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Namun begitu, untuk sosialisasi rutin ke masyarakat, P2TP2A Kota Cimahi biasa melakukannya lima kali dalam setahun. Target audiens yang dituju juga bermacam-macam, yaitu:

1. Internal Pemerintah Kota Cimahi
2. Masyarakat (biasanya garda terdepan seperti perwakilan Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga)
3. Istri-Istri ASN
4. Ibu-Ibu ASN
5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Posyandu
7. Sekolah